

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Kemendagri Tolak Tenaga Ahli untuk Setiap Anggota Dewan

### Gambir, Warta Kota

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak usulan tenaga ahli bagi setiap anggota DPRD DKI Jakarta. Demikian diungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Syarif, Senin (23/9).

Syarif menjelaskan, keputusan Kemendagri itu terungkap saat DPRD DKI Jakarta mengonsultasikan tata tertib (Tatib) dewan dengan Kemendagri pada Jumat (20/9). "Tenaga ahli salah satunya dievaluasi oleh Kemendagri," kata Syarif.

Syarif mengatakan, Kemendagri menolak usulan tenaga ahli bagi setiap anggota dewan karena mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten. Namun demikian, Kemendagri menyetujui adanya satu tenaga ahli bagi setiap fraksi.

"Ada 187 pasal di Tatib dan sekitar 20-30 persen direvisi. Angka itu (yang direvisi) sedikit. Salah satunya penambahan tenaga ahli bagi setiap anggota dewan," ujar Syarif. Meski demikian Syarif enggan membeberkan lebih dalam usulan di dalam Tatib yang ditolak Kemendagri dengan alasan, dewan masih berkoordinasi dengan Kemendagri dalam mematangkan draf Tatib tersebut.

"Itu saja (soal Tatib) yang bisa saya sebutkan, karena nggak enak kalau saya buka semuanya. Tapi, kalau sudah

turun (disetujui) nanti kami publish (siarkan)," katanya.

### Pengawas

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan, keberadaan tenaga ahli bagi setiap anggota DPRD sangat diperlukan. Sebagai pengawas pemerintah, legislator juga memiliki kesibukan dalam menampung aspirasi masyarakat demi menjaga konstituenya.

"Kami setuju dengan adanya tenaga ahli, apalagi dengan anggaran DKI yang besar sekitar Rp 90 triliun, sehingga pengawasan dan pembahasan mengenai anggaran bisa lebih detail karena ada yang membantu kami," kata Basri.

Sementara, Anggota DPRD

DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan, tidak semua anggota DPRD yang baru terpilih memiliki latar belakang politik dan pembahasan APBD. Karena itu, Suhaimi setuju bila tenaga ahli harus disiapkan untuk masing-masing anggota dewan.

Selama ini tenaga ahli dibiayai sendiri oleh masing-masing anggota dewan maupun fraksi. Bila nanti dibiayai dari APBD, maka kemampuan tenaga ahli yang direkrut harus sesuai dengan bidang yang ditugaskan. "Misalnya untuk Komisi A nanti harus staf ahli yang menguasai pemerintahan, Komisi B untuk ekonomi, Komisi C bidang Keuangan dan sebagainya," kata Suhaimi. (faf)